

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap perusahaan yang didirikan pasti memiliki tujuan. Tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan laba secara maksimal. Munculnya pasar saham membuat tujuan perusahaan bertambah. Selain memaksimalkan laba, tujuan suatu perusahaan yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham perusahaan di bursa saham.

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap suatu perusahaan yang berkaitan dengan harga saham. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Nilai perusahaan yang tinggi akan memiliki dampak kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga para pemegang saham menginvestasikan modalnya ke perusahaan tersebut (Tendi Haruman, 2008).

. Menurut Suad Husnan (2004) nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, hal ini penting karena memaksimalkan nilai perusahaan berarti sama dengan

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan suatu perusahaan.

Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kemakmuran para pemilik tidak selalu berjalan sesuai harapan. Contohnya pada kuartal I tahun 2015 terdapat enam perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kelesuan harga saham. Perusahaan tersebut yaitu PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Aneka Tambang Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. PT Aneka Tambang Tbk menjadi emiten yang sahamnya mengalami penurunan harga saham paling besar pada kuartal I tahun 2015 yakni sebesar 20,28%. Harga saham PT.Antam Tbk menjadi Rp 865 per lembar pada 31 Maret 2015 dibandingkan dengan Rp 1.085 pada akhir tahun lalu (<http://www.bisnis.com>).

Selain PT Aneka Tambang Tbk, Perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi juga mengalami kelesuan harga saham. Perusahaan tersebut yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Secara keseluruhan, 4 emiten itu membukukan total laba Rp177,6 miliar pada kuartal I/2015. Jumlah tersebut turun 29% atau lebih rendah dibandingkan dengan laba 4 emiten tersebut pada kuartal I/2014 sebesar Rp251,97 miliar (tumbuh 16,4%) dan pada kuartal I/2013 sebesar Rp216,36 miliar (tumbuh 66,39%). Pendapatan 4 emiten BUMN tersebut juga mengalami perlambatan pada kuartal I/2015 atau hanya sebesar Rp6,63 triliun atau turun 8,27% dibandingkan dengan

Rp7,26 triliun pada kuartal I/2014. Pada Januari-Maret 2014, pendapatan 4 emiten itu tumbuh 16,64% dan pada periode yang sama pada 2013 tumbuh 61,3%. Dengan demikian, penurunan pendapatan dan laba itu baru terjadi pada awal tahun ini (<http://www.bisnis.com>). Perusahaan BUMN lain yang mengalami kelesuan harga saham adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk dengan penurunan sebesar 20%. Emiten berkode saham PGAS itu sepanjang tahun lalu membukukan peningkatan harga saham hingga 34% (<http://www.bisnis.com>).

Secara sektoral, Indeks Harga Saham gabungan juga mengalami pelemahan. Dari 9 (sembilan) indeks sektoral IHSG, sebanyak 6 (enam) indeks sektoral mengalami pelemahan. Pelemahan paling dalam terjadi pada indeks sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur mengalami pelemahan sebesar 0,56 % (<http://www.solopos.com>).

Selain terjadi pada sektor infrastruktur, pelemahan nilai saham juga terdapat pada sektor pertambangan. Saham sektor pertambangan tertekan di tengah kelesuan harga minyak mentah yang menjadi sentimen negatif aktivitas di bursa global. Minyak *West Texas Intermediate (WTI)* masih bergerak di level terendah dalam 6 tahun di kisaran US\$37/barel. PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) adalah beban utama indeks sektor pertambangan dengan pelemahan 2,29%, diikuti oleh PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang turun 1,84% (<http://www.market.bisnis.com>).

Dari beberapa fenomena tersebut, suatu perusahaan harus berusaha menjaga nilai perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham perusahaan di bursa

efek. Untuk menjaga nilai suatu perusahaan, manajemen suatu perusahaan harus menjaga kepercayaan investor dengan menjalankan proses bisnis sesuai dengan tata cara pengelolaan perusahaan yang baik agar investor percaya bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Seorang investor yang rasional akan mempertimbangkan keberlanjutan dari suatu perusahaan. Dengan demikian, seorang investor memerlukan informasi mengenai perusahaan secara menyeluruh untuk memprediksi prospek perusahaan tersebut.

Dengan kondisi seperti ini, para investor mengharapkan adanya transparansi (keterbukaan) dari pihak manajemen perusahaan dimana pihak manajemen dituntut untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, serta tepat waktu (Adhi Pamungkas, 2014).

Prinsip transparansi merupakan bagian dari *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis modern dimana perusahaan harus berhadapan dengan banyak *stakeholder* dengan kepentingannya masing-masing. *Stakeholder* tersebut antara lain investor, pemerintah, masyarakat umum, calon investor, pemberi pinjaman, dan lain-lain.

Dengan melaksanakan *Good Corporate Governance* perusahaan akan mendapatkan berbagai macam kemudahan dalam menjalankan hubungan baik dengan *stakeholder*. Berbeda halnya dengan perusahaan yang tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik akan sulit mendapatkan kepercayaan dari para

pemangku kepentingan. Hal tersebut dapat terlihat ketika Komisi XI DPR-RI yang diketuai Fadel Muhammad menyatakan akan menolak permohonan beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan alasan kinerja perusahaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (<http://www.viva.co.id>). Pernyataan tersebut didasarkan laporan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada XI DPR-RI. Dalam berita lainnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan bahwa telah banyak perusahaan BUMN yang sudah keluar jalur dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk itu Menteri BUMN meminta agar perusahaan BUMN menjalankan bisnisnya secara profesional dan mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* (<http://www.merdeka.com>). Selain dua berita di atas, arti pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* juga dapat terlihat dari keputusan Komisi VI DPR-RI mengenai persetujuan penambahan (Penyertaan Modal Negara) PMN kepada tiga perusahaan BUMN dengan disertai catatan atau syarat bahwa perusahaan tersebut harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (<http://www.merdeka.com>).

Permasalahan penerapan *Good Corporate Governance* juga dikemukakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida. Menurut Nurhaida, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) emiten di Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara ASEAN lain. Hal ini terlihat dari gelaran penghargaan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* tahun 2015 di Manila. Dari 50 emiten terbaik, hanya ada 2 emiten dari Indonesia

yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Danamon Tbk. Hal itu berbanding terbalik dengan negara-negara tetangga Indonesia di ASEAN seperti Thailand ada 8 emiten, Filipina ada 11 emiten, Singapura ada 8 emiten, dan Malaysia ada 6 emiten (<http://www.finance.detik.com>).

Anjuran untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan juga diungkapkan oleh Prof Niki Lukviarman SE., MBA., Akt., DBA., CA dalam sebuah seminar internasional. Prof Niki menyebutkan, semakin hari kompleksitas kegiatan di dunia bisnis semakin tinggi, yang berarti potensi resiko dan tantangan juga berpotensi meningkat. Karena itu, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sangat diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Implementasi dari *GCG* diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dimana *GCG* mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh (<http://www.medanbisnisdaily.com>).

Dari beberapa fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* oleh suatu perusahaan menjadi sangat penting dan menjadi sebuah keharusan demi kepentingan bersama antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Selain itu, sebagaimana pernyataan Profesor Niki bahwa *GCG* merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang akan dimulai pada akhir tahun 2015. Selain itu, dari beberapa fenomena yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang ada di Indonesia belum

dilakukan secara maksimal sehingga perusahaan tersebut kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang buruk bisa berdampak negatif bagi perusahaan itu sendiri. Beberapa perusahaan besar di Indonesia tidak mampu lagi menjalankan kegiatannya secara berkesinambungan akibat menjalankan tata kelola perusahaan yang buruk. Contohnya yaitu beberapa pemerintah yang telah dilikuidasi/dimerger (Bank pembangunan Indonesia-Bapindo, Bank Dagang Negara-BDN, Bank Bumi Daya-BBD, Bank Export-Import), PT. Indorayon, PT Dirgantara Indonesia, dan PT. Lapindo Brantas. Pada Intinya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk serta tata kelola pemerintahan yang buruk sehingga memberi peluang timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Sukrisno Agoes, 2011). Dari uraian tersebut membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* menjadi isu yang sangat penting karena tata kelola perusahaan yang buruk akan berdampak negatif terhadap perusahaan itu sendiri maupun berdampak negatif terhadap masyarakat secara umum.

Selain *Good Corporate Governance*, isu yang sedang berkembang dalam dunia bisnis yaitu masalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Masalah *CSR* berkembang seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian alam akibat isu *global warming*. Selain masalah hubungan perusahaan dengan alam, perusahaan juga dituntut untuk menjaga keselarasan dengan lingkungan sosial masyarakat. Dengan kondisi demikian, suatu perusahaan dituntut untuk lebih peka

dengan kepentingan masyarakat dan tidak hanya peka dengan kepentingan manajemen serta pemilik modal saja.

Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melaksanakan program *CSR*, antara lain produk yang dijual perusahaan akan semakin disukai oleh konsumen karena dengan membeli produk tersebut berarti ikut menjaga lingkungan hidup. Hal berbeda akan terjadi dengan perusahaan yang tidak peka terhadap aspek lingkungan, perusahaan tersebut lambat laun akan ditinggalkan konsumen bahkan investor karena citra buruk perusahaan di mata masyarakat. *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat digunakan sebagai alat *marketing* baru bagi perusahaan bila itu dilakukan secara terus menerus oleh perusahaan. Dengan ikut peka mengenai masalah lingkungan, suatu perusahaan akan memiliki citra yang baik sehingga akan disukai oleh masyarakat dan juga investor.

Masalah lingkungan yang menyebabkan kemerosotan suatu perusahaan terjadi pada kasus PT. Indorayon. Kecerobohan PT. Indorayon yaitu dalam melakukan pengelolaan bahan baku berupa pinus di sekitar Danau Toba. Kesalahan PT. Indorayon dalam mengelola hutan pinus tersebut menyebabkan kerusakan tata air di Danau Toba. Permukaan air Danau Toba sempat mengalami penurunan tajam sehingga mempengaruhi penghasilan masyarakat peternak ikan di sekitar Danau Toba. Masyarakat menjadi marah dan secara paksa menghentikan aktivitas usaha di sekitar Danau tersebut. PT. Indorayon tidak dapat beroperasi karena hubungan yang tidak baik dengan masyarakat di sekitar lokasi pasokan bahan baku (Sukrisno Agoes, 2011).



Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat membantu meningkatkan perkembangan sosial. Hal itu diungkapkan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang menyatakan bahwa dana *CSR* dapat membantu mendanai program pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan serta membantu pemerintah dalam hal pembangunan sosial. Dalam pidatonya Menteri Puan menyebutkan langkah nyata pengelolaan dana *CSR* tersebut antara lain dalam bentuk keuangan mikro, peningkatan fasilitas kesehatan, perumahan, air dan sanitasi, serta pertanian dan kehutanan (<http://www.okezone.com>).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Palembang, Syafran Syarofi juga mengungkapkan bahwa dana *CSR* sangat bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Syafran, dana *CSR* dapat digunakan untuk memperbaiki serta membangun infrastruktur pendidikan di Kota Palembang. Dana *CSR* tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu keterbatasan dana pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Palembang (<http://www.tribunnews.com>).

Walaupun memiliki manfaat yang sangat besar, pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* masih memiliki masalah. Sebagai contoh yaitu pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar yang menyebutkan bahwa di Kabupaten Bekasi terdapat kurang lebih 6.000 perusahaan. Namun kondisi masyarakat di daerah tersebut masih memprihatinkan karena masih banyak warga di daerah sekitar perusahaan yang termasuk dalam kategori miskin. Menteri Marwan memberikan

anjaran bagi perusahaan untuk lebih mengutamakan daerah sekitar dalam hal penyaluran dana *CSR* (<http://www.merdeka.com>).

Contoh lain masalah pengelolaan dana *CSR* yaitu penyalahgunaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Pertamina Foundation. Bareskrim Polri menetapkan mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada program gerakan menabung pohon. Nina diduga melakukan korupsi serta pencucian uang. Dari salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima, Bareskrim memulai penyidikan kasus tersebut tertanggal 27 Agustus 2015. Nina disangka menggunakan pasal korupsi dan pasal pencucian uang (<http://www.detik.com>).

Suwandi, Ketua Umum *Corporate Forum for Community Development (CFCD)* memberikan pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan Menteri Marwan. Suwandi menyatakan bahwa pengelolaan dana *CSR* masih memiliki kendala teknis. Ia melihat, jangkauan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia juga belum merata sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar dana *CSR* hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu saja. Selain itu juga tidak dilakukan secara berkelanjutan. Bahkan, ditemukan juga fakta bahwa dalam pelaksanaan *CSR* yang berpola kemitraan tidak dilakukan secara baik sejak awal. Suwandi dapat menyimpulkan bahwa program *CSR* yang menurut dia sebenarnya diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan pebisnis ternyata belum mampu mengatasi kesenjangan pendapatan. Walaupun masih memiliki kendala teknis,

Suwandi Menyatakan bahwa ada pemahaman dikalangan masyarakat bahwa kerja sama yang mereka jalani dengan perusahaan, ternyata satu kegiatan yang menghasilkan manfaat bagi mereka. Masyarakat telah menyadari bahwa perbaikan tata kelola bisnis perusahaan akan secara langsung memberikan dampak terhadap pendapatan mereka. Fenomena ini merupakan bukti aktual simbiosis mutualisme (<http://www.vivanews.com>).

Melihat fenomena Nilai Perusahaan, *Good Corporate Governance (GCG)*, serta *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dari *Good Corporate Governance (GCG)* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Nilai Perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Reny Dyah Retno. Hasil dari penelitian sebelumnya menyatakan bahwa secara parsial *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan sedangkan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Secara simultan *Good Corporate Governance (GCG)* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan variabel kontrol berupa *size*, *leverage*, dan jenis

industri sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak menggunakan variabel kontrol.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti program pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*
2. Bagaimana Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti program pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*
3. Bagaimana Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti program pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*
4. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan

5. Seberapa besar pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan
6. Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti program pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*
2. Untuk mengetahui Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti program pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*
3. Untuk mengetahui Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti program pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*
4. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan
5. Untuk mengetahui pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan
6. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta referensi dalam penelitian bidang ekonomi khususnya akuntansi, terutama mengenai sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Nilai perusahaan, *Good Corporate Governance*, serta *Pengungkapan Corporate Social Responsibility*.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan secara teori maupun kondisi nyata di lapangan mengenai *Good Corporate Governance*, *Pengungkapan Corporate Social Responsibility* serta Nilai Perusahaan.

#### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan mengenai sejauh mana pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Pengungkapan Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan gambaran mengenai pentingnya melaksanakan tatakelola perusahaan yang baik serta melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

### 3. Bagi Dunia Akademis

Penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia akademis karena penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan atau referensi dalam kegiatan perkuliahan ataupun penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan gambaran bagi penelitian berikutnya yang membahas mengenai Nilai Perusahaan, *Good Corporate Governance*, dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan studi ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Bandung yang beralamat di Jl. Veteran No. 10 Bandung untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengikuti program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* serta informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun waktu penelitian dimulai pada Mei 2015.